

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dengan Belanja Modal sebagai Variabel Moderasi pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara periode 2021-2023. Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan di atas, maka kesimpulan dari penelitian ini dapat dirangkum sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara. Artinya, semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah dalam menggali dan mengelola sumber-sumber PAD, maka semakin baik pula kinerja keuangan daerah yang dihasilkan. Peningkatan PAD mencerminkan tingkat kemandirian fiskal daerah yang lebih baik serta memberikan ruang fiskal yang lebih luas bagi pemerintah daerah dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Oleh karena itu, optimalisasi PAD melalui peningkatan efektivitas pemungutan pajak dan retribusi daerah, pembaruan basis data wajib pajak, penerapan sistem digitalisasi, serta peningkatan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) menjadi langkah penting dalam mendukung peningkatan kinerja keuangan pemerintah daerah.
2. Dana Perimbangan berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara. Hasil ini

menunjukkan bahwa dana perimbangan masih memiliki peranan penting dalam mendukung kinerja keuangan pemerintah daerah. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa pemerintah daerah masih memerlukan dukungan dana transfer dari pemerintah pusat untuk menjalankan fungsi pemerintahan dan pelayanan publik, sehingga tingkat ketergantungan fiskal daerah terhadap dana perimbangan masih relatif tinggi.

3. Belanja Modal tidak mampu memoderasi pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan PAD belum sepenuhnya diikuti dengan alokasi belanja modal yang produktif. Dengan kata lain, pengelolaan belanja modal yang belum optimal menyebabkan perannya belum mampu memperkuat hubungan antara PAD dan kinerja keuangan pemerintah daerah.
4. Belanja Modal tidak mampu memoderasi pengaruh Dana Perimbangan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara. Hasil ini mengindikasikan bahwa dana perimbangan yang diterima pemerintah daerah belum sepenuhnya diarahkan pada belanja modal yang berorientasi pada investasi jangka panjang. Akibatnya, belanja modal belum dapat berfungsi sebagai faktor penguat dalam hubungan antara dana perimbangan dan kinerja keuangan pemerintah daerah. Kondisi ini menunjukkan perlunya peningkatan kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan belanja modal agar dapat memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kinerja keuangan daerah.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian ini, maka Penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Daerah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara perlu mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah sebagai sumber utama pembiayaan pembangunan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak serta retribusi, pembaruan basis data wajib pajak, serta digitalisasi sistem pemungutan untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi. Penerapan sistem pembayaran elektronik juga dapat mempermudah masyarakat memenuhi kewajiban sekaligus mengurangi kebocoran penerimaan. Selain itu, peningkatan kinerja BUMD dengan tata kelola yang baik diharapkan dapat meningkatkan kontribusi hasil pengelolaan kekayaan daerah terhadap PAD.
2. Bagi Pemerintah Pusat diharapkan mendukung daerah dalam memperkuat kemandirian fiskal melalui bimbingan teknis, pelatihan, dan fasilitas digitalisasi pajak daerah. Selain itu, pengembangan sektor strategis seperti pariwisata, perdagangan, pertanian, dan industri kreatif dapat menjadi sumber pendapatan baru, sehingga ketergantungan daerah terhadap dana transfer berkurang dan ruang fiskal daerah untuk prioritas pembangunan meningkat.
3. Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk mengkaji faktor-faktor yang memengaruhi PAD, seperti kepatuhan pajak, efektivitas digitalisasi, dan kontribusi sektor unggulan daerah, serta dapat menambahkan variabel lain terkait kemandirian fiskal untuk memperoleh gambaran pengelolaan keuangan daerah yang lebih komprehensif.